

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

---

## **PERAN PRAJURIT AKADEMI MILITER DALAM MENDUKUNG PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) DI WILAYAH KOTA MAGELANG**

Sugihartono<sup>1</sup>  
Indra Kristian<sup>2</sup>  
Atik Rochaeni<sup>3</sup>

*1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani*

Email Korespondensi :

### **Abstract**

*This study explores the role of cadets from the Indonesian Military Academy (Akmil) in supporting the implementation of the Free Nutritious Meal Program (Program Makan Bergizi Gratis, MBG) in Magelang City. The research aims to analyze how military cadets, as agents of social change and defense human resources, participate in the national food security initiative through active, passive, and participatory roles. Using Soerjono Soekanto's theory of social roles and a qualitative descriptive approach, data were collected through interviews, observation, and document analysis. The findings reveal that cadets play a significant active role in operational assistance, a passive role in maintaining discipline and order during distribution, and a participatory role in community engagement and health education. This collaboration between the military and the civilian government not only enhances the success of the MBG program but also strengthens civil-military relations and public trust in the Indonesian Armed Forces (TNI). The study concludes that the involvement of Akmil cadets exemplifies an integrative model of national defense contribution through social service and humanitarian engagement.*

**Keywords:** *military cadets, free nutritious meal, soft power, civil-military cooperation, public service*

### **PENDAHULUAN**

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional yang diluncurkan pemerintah dalam rangka meningkatkan status gizi anak-anak sekolah dan masyarakat kurang mampu. Program ini berfokus pada penyediaan makanan bergizi seimbang yang disalurkan melalui lembaga pendidikan, fasilitas umum, dan kerja sama lintas instansi. Di wilayah Kota Magelang, implementasi program MBG memiliki kekhasan tersendiri karena melibatkan peran aktif dari Prajurit

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

---

dan Taruna Akademi Militer (Akmil) yang berlokasi di wilayah tersebut. Kolaborasi ini menarik untuk dikaji karena menunjukkan model integrasi antara kebijakan sosial pemerintah dengan potensi sumber daya pertahanan yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat.

Latar belakang kemunculan program MBG didorong oleh kondisi nyata ketimpangan gizi di Indonesia, di mana masih banyak anak usia sekolah dan masyarakat prasejahtera yang mengalami defisiensi asupan protein, zat besi, dan vitamin. Data Kementerian Kesehatan (2023) menunjukkan bahwa prevalensi stunting nasional masih berada di angka 21,5%, sementara angka anemia pada anak sekolah mencapai 22%. Di sisi lain, kebijakan pembangunan manusia yang berkelanjutan menuntut keterlibatan seluruh elemen bangsa, termasuk institusi pertahanan, dalam meningkatkan ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat. Dalam konteks inilah, kehadiran Prajurit Akmil menjadi instrumen strategis yang menjembatani nilai-nilai pertahanan dan kemanusiaan.

Keterlibatan Prajurit Akmil dalam mendukung program MBG sejalan dengan semangat operasi militer selain perang (OMSP) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam pasal 7 disebutkan bahwa OMSP meliputi kegiatan membantu pemerintah daerah, menanggulangi bencana, serta mendukung program kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi Akmil dalam program MBG bukan hanya bentuk pengabdian sosial, melainkan manifestasi dari fungsi pertahanan non-militer yang bertujuan memperkuat kemandirian bangsa di bidang pangan dan kesehatan.

Dari perspektif sosiologis, keikutsertaan Prajurit Akmil dalam program MBG mencerminkan sinergi antara peran sosial militer dengan kebutuhan masyarakat sipil. Sejak lama, hubungan sipil-militer di Indonesia didasarkan pada prinsip TNI Manunggal dengan Rakyat. Dalam konteks ini, prajurit bukan hanya simbol kekuatan pertahanan, tetapi juga agen pembangunan sosial yang memiliki kedisiplinan, kepedulian, dan kapasitas mobilisasi tinggi. Melalui program MBG, citra TNI sebagai

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

kekuatan rakyat yang humanis semakin menguat, terutama di wilayah Magelang yang secara historis merupakan pusat pendidikan militer nasional.

Namun, dalam implementasinya, kolaborasi antara TNI AD dan pemerintah daerah tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Masih terdapat persoalan koordinasi, logistik, serta keterbatasan sumber daya dalam distribusi makanan bergizi di sejumlah titik sekolah dan fasilitas umum. Selain itu, sebagian masyarakat masih memandang keterlibatan militer dalam urusan sosial sebagai bentuk perluasan peran yang perlu diawasi agar tetap sesuai dengan koridor hukum dan kebijakan publik. Oleh karena itu, penting untuk menelaah sejauh mana peran Prajurit Akmil dapat dinilai efektif, proporsional, dan berdampak nyata terhadap keberhasilan program MBG.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peran Prajurit Akademi Militer dalam mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di wilayah Kota Magelang? Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan bentuk-bentuk peran aktif, pasif, dan partisipatif prajurit Akmil dalam mendukung kebijakan tersebut serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas keterlibatan mereka.

Penelitian ini memiliki kontribusi strategis baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperluas penerapan teori peran dalam konteks kelembagaan militer yang terlibat dalam kebijakan sosial. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pengembangan model sinergi pertahanan dan pembangunan sosial di tingkat daerah, khususnya dalam mendukung agenda ketahanan pangan dan pengentasan stunting di Indonesia..

### *Kerangka Teori*

Penelitian ini menggunakan teori peran dari Soerjono Soekanto (2019) yang menjelaskan bahwa peran sosial merupakan aspek dinamis dari status seseorang dalam masyarakat, yang menggambarkan bagaimana individu menjalankan hak dan

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

---

kewajibannya sesuai kedudukan sosialnya. Dalam konteks ini, prajurit Akademi Militer memiliki peran strategis tidak hanya sebagai pelaksana fungsi pertahanan, tetapi juga sebagai aktor sosial dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia.

Menurut Soekanto, peran sosial dapat dibedakan menjadi tiga dimensi utama, yaitu peran aktif, peran pasif, dan peran partisipatif.

- a. Peran aktif menggambarkan keterlibatan langsung individu dalam melaksanakan tugas atau kegiatan sosial tertentu. Dalam konteks penelitian ini, peran aktif prajurit Akmil tercermin dalam keterlibatan mereka dalam kegiatan distribusi, pengawasan, dan pendampingan pelaksanaan program MBG.
- b. Peran pasif mencakup kepatuhan terhadap kebijakan, tata tertib, serta pelaksanaan instruksi dari otoritas yang lebih tinggi. Prajurit Akmil diharapkan mampu menjaga kedisiplinan, ketertiban, dan stabilitas lingkungan selama pelaksanaan program.
- c. Peran partisipatif menggambarkan kontribusi yang bersifat sukarela dan kolaboratif dalam menciptakan inovasi sosial serta membangun komunikasi yang harmonis dengan masyarakat. Dimensi ini penting karena memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan publik sangat bergantung pada kemauan masyarakat dan lembaga pertahanan untuk bekerja bersama secara inklusif.

Secara teoretis, penerapan konsep peran dalam lingkungan militer yang mendukung kebijakan sipil menggambarkan adanya pergeseran paradigma pertahanan dari kekuatan koersif menuju kekuatan kolaboratif. Teori ini menjadi dasar analisis untuk memahami bagaimana Akmil sebagai institusi pendidikan pertahanan mempraktikkan nilai-nilai disiplin, kepemimpinan, dan kemanusiaan dalam mendukung kebijakan sosial nasional seperti program MBG.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan **pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif** untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai peran prajurit Akmil dalam mendukung pelaksanaan program MBG di Kota Magelang. Lokasi penelitian ditetapkan di Akademi Militer (Akmil) Magelang dan beberapa titik pelaksanaan distribusi MBG, termasuk sekolah dasar dan menengah di wilayah Kecamatan Magelang Utara dan Selatan.

Informan penelitian terdiri dari pejabat pelaksana program di Akmil, prajurit pendamping lapangan, pihak Dinas Ketahanan Pangan Kota Magelang, serta masyarakat penerima manfaat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung terhadap kegiatan distribusi makanan bergizi, serta dokumentasi resmi dari pemerintah daerah dan satuan pelaksana Akmil.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2019), yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya menafsirkan makna dari tindakan dan interaksi sosial prajurit dalam konteks dukungan terhadap kebijakan publik yang bersifat sosial dan kemanusiaan.

## **PEMBAHASAN**

Kota Magelang merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki tingkat partisipasi tinggi dalam pelaksanaan program MBG. Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan (2024), tercatat lebih dari 15.000 paket makanan bergizi telah didistribusikan setiap bulan dengan dukungan 250 personel Akmil. Program ini dilaksanakan melalui koordinasi lintas sektor antara Pemerintah Kota Magelang, Akmil, dan pihak sekolah penerima manfaat.

Keterlibatan Akmil tidak hanya bersifat simbolis, tetapi substantif dalam memastikan keamanan, ketertiban, dan efektivitas penyaluran makanan. Observasi

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

menunjukkan bahwa kegiatan dilakukan dengan disiplin tinggi, efisien, dan sesuai standar kebersihan. Peran prajurit terlihat mulai dari proses persiapan logistik, pengepakan makanan, distribusi ke sekolah, hingga evaluasi bersama instansi terkait.

Peran aktif prajurit Akademi Militer dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Magelang menggambarkan bentuk keterlibatan langsung personel militer dalam kegiatan sosial masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa perwira pelaksana dan taruna yang terlibat, prajurit Akmil berperan dalam berbagai tahapan implementasi program mulai dari persiapan logistik, pengawasan distribusi, hingga pendampingan pelaksanaan di lapangan. Setiap hari, kelompok prajurit secara bergantian ditugaskan untuk memastikan bahwa bahan makanan disalurkan tepat waktu, higienis, dan sesuai standar gizi yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan. Kehadiran mereka memberikan dampak nyata terhadap efisiensi pelaksanaan program, terutama dalam mengatasi kendala distribusi di daerah yang sulit dijangkau kendaraan umum.

Observasi lapangan menunjukkan bahwa disiplin dan ketegasan yang menjadi ciri khas prajurit militer membawa pengaruh positif terhadap keteraturan pelaksanaan kegiatan. Ketepatan waktu menjadi aspek penting yang dijaga secara konsisten, baik dalam proses distribusi maupun evaluasi harian. Berdasarkan catatan pelaksanaan selama tiga bulan pertama, tingkat keterlambatan distribusi menurun hingga 35% setelah Akmil terlibat langsung dalam sistem pengawasan. Ini menunjukkan bahwa peran aktif prajurit tidak hanya bersifat simbolik tetapi fungsional, terutama dalam aspek manajemen logistik dan pengendalian waktu pelaksanaan kegiatan sosial.

Hasil wawancara juga mengungkap bahwa motivasi para prajurit dalam menjalankan tugas sosial ini tidak sekadar menjalankan perintah komando, melainkan bentuk pengabdian moral kepada masyarakat. Seorang prajurit taruna menyatakan bahwa keterlibatan mereka dalam program MBG membuat mereka memahami arti pertahanan dalam dimensi yang lebih luas, yaitu membela rakyat bukan hanya melalui

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

---

kekuatan senjata tetapi juga melalui pelayanan kemanusiaan. Pernyataan ini memperlihatkan internalisasi nilai-nilai *TNI Manunggal dengan Rakyat* sebagai bagian dari pembentukan karakter taruna yang profesional dan berempati.

Dari sisi analisis, peran aktif prajurit ini memperlihatkan bagaimana institusi militer mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat sipil dalam menjalankan program pemerintah. Ketika prinsip disiplin militer dikombinasikan dengan tujuan sosial, maka terbentuklah efisiensi dan ketertiban yang sulit dicapai hanya melalui birokrasi sipil. Keterlibatan prajurit juga membantu memperkuat legitimasi pemerintah daerah di mata masyarakat, karena program MBG tidak lagi dipandang sebagai proyek administratif semata tetapi sebagai gerakan sosial bersama antara militer dan rakyat.

Dengan demikian, dapat ditafsirkan bahwa peran aktif prajurit Akmil dalam program MBG merupakan manifestasi nyata dari konsep pertahanan nirmiliter yang menekankan kekuatan moral dan kemanusiaan. Ketika kegiatan sosial dilakukan dengan etos disiplin dan tanggung jawab yang tinggi, maka fungsi militer sebagai pelindung rakyat semakin terasa dalam kehidupan sehari-hari. Peran aktif ini sekaligus membuktikan bahwa prajurit TNI tidak hanya menjadi penjaga keamanan negara, tetapi juga agen pembangunan manusia yang tangguh dan berintegritas.

Peran pasif prajurit dalam konteks ini tidak dapat dimaknai sebagai ketidakaktifan, melainkan sebagai bentuk kepatuhan, ketertiban, dan kesadaran terhadap sistem kerja yang sudah ditetapkan oleh otoritas sipil maupun komando militer. Berdasarkan hasil penelitian, para prajurit Akmil menunjukkan tingkat disiplin yang tinggi dalam menjalankan instruksi selama pelaksanaan program MBG. Mereka mematuhi prosedur yang diatur oleh dinas terkait tanpa melakukan intervensi terhadap kebijakan teknis distribusi. Kepatuhan ini menjadi landasan penting yang menjamin stabilitas dan kepercayaan antarinstansi. Tanpa disiplin kolektif seperti ini, kegiatan sosial berskala besar seperti MBG sulit mencapai efektivitas yang optimal.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

---

Observasi di lapangan menunjukkan bahwa prajurit yang bertugas di pos distribusi tidak melakukan improvisasi di luar instruksi resmi. Mereka menunggu perintah dari petugas sipil sebelum mengambil tindakan, terutama dalam hal pembagian makanan dan penanganan keluhan masyarakat. Pola ini menggambarkan adanya pembagian peran yang jelas antara pemerintah daerah sebagai pemegang kebijakan dan prajurit sebagai pelaksana lapangan. Struktur koordinasi seperti ini mencegah tumpang tindih kewenangan dan menjaga netralitas militer dalam kegiatan sipil. Dengan cara ini, TNI AD tetap menjaga prinsip profesionalisme sekaligus menunjukkan komitmen terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam wawancara, sejumlah pejabat pelaksana program menyatakan bahwa kehadiran prajurit Akmil memberikan rasa aman dan tertib di lokasi kegiatan tanpa menimbulkan kesan represif. Mereka menjalankan fungsi pengawasan sosial yang tidak bersifat memerintah, tetapi mengarahkan masyarakat agar tertib dalam antrean dan menjaga kebersihan selama kegiatan berlangsung. Sikap ini mencerminkan peran pasif yang konstruktif, di mana prajurit tidak mendominasi tetapi memastikan seluruh proses berjalan sesuai tata aturan. Dalam kerangka hubungan sipil-militer, pola interaksi seperti ini memperlihatkan kematangan institusional dan kemampuan adaptasi prajurit terhadap dinamika masyarakat sipil.

Secara analitis, peran pasif ini menegaskan nilai penting dari budaya kepatuhan dan hierarki dalam militer yang dapat berkontribusi positif pada pelaksanaan program sosial. Ketika aparat militer mampu menjaga sikap profesional, maka koordinasi lintas lembaga menjadi lebih harmonis dan efektif. Dalam jangka panjang, hal ini memperkuat citra TNI sebagai kekuatan yang taat hukum dan siap mendukung kebijakan pemerintah tanpa kehilangan identitas pertahanannya.

Dengan demikian, peran pasif prajurit Akmil dalam program MBG merupakan bentuk tanggung jawab moral dan kelembagaan terhadap peraturan serta tatanan sipil yang berlaku. Ketika prajurit mampu berperan pasif secara disiplin, mereka tidak

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

---

kehilangan fungsinya, justru memperkuat posisi TNI sebagai mitra strategis pemerintah dalam menegakkan ketertiban sosial dan mengawal kebijakan publik dengan penuh tanggung jawab.

Peran partisipatif prajurit Akmil dalam program MBG menjadi dimensi yang paling mencerminkan integrasi nilai-nilai kemanusiaan dan sosial dalam pendidikan militer. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, banyak prajurit secara sukarela berinteraksi dengan masyarakat penerima manfaat, memberikan edukasi tentang pentingnya gizi seimbang, dan membantu anak-anak memahami cara menjaga kebersihan makanan. Interaksi ini melahirkan hubungan sosial yang positif antara taruna dan warga, di mana kehadiran militer tidak lagi dipandang sebagai kekuatan formal yang menakutkan, tetapi sebagai sahabat masyarakat.

Dalam kegiatan bakti sosial yang diselenggarakan bersama Dinas Ketahanan Pangan, prajurit Akmil turut memberikan penyuluhan tentang pola makan sehat, cara pengolahan bahan pangan, dan pemanfaatan pekarangan rumah untuk ketahanan pangan keluarga. Kegiatan ini menunjukkan bahwa keterlibatan mereka tidak terbatas pada urusan distribusi, tetapi meluas ke ranah edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Partisipasi aktif seperti ini memperkuat kapasitas masyarakat dalam memahami nilai program dan mendorong keberlanjutan dampaknya.

Dari hasil observasi ditemukan bahwa komunikasi yang terjalin antara prajurit dan masyarakat berlangsung dengan hangat dan saling menghargai. Tidak ada kesan superioritas atau jarak sosial yang berlebihan. Prajurit menempatkan diri sebagai mitra warga, bukan sebagai pengendali. Pola komunikasi ini menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap TNI sebagai bagian dari masyarakat. Keakraban ini juga berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan, karena masyarakat merasa dilibatkan secara langsung dan dihargai pendapatnya dalam proses evaluasi program.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

---

Analisis peneliti menunjukkan bahwa partisipasi prajurit dalam konteks sosial seperti ini memiliki nilai strategis bagi pembentukan karakter prajurit yang berwawasan humanis. Proses interaksi sosial yang terjadi selama kegiatan MBG menjadi wahana pendidikan praktis bagi taruna dalam menerapkan nilai-nilai kepemimpinan, empati, dan solidaritas. Dengan demikian, kegiatan sosial semacam ini tidak hanya berdampak pada masyarakat penerima manfaat, tetapi juga membentuk kualitas sumber daya manusia pertahanan yang berjiwa sosial dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Kesimpulan dari dimensi partisipatif menunjukkan bahwa pelibatan prajurit Akmil dalam program MBG merupakan bentuk konkret dari diplomasi sosial militer yang memperkuat hubungan sipil-militer di tingkat lokal. Ketika prajurit mampu berinteraksi secara terbuka, mendengarkan aspirasi masyarakat, dan turut berkontribusi dalam pendidikan gizi serta pemberdayaan komunitas, maka TNI AD berhasil menunjukkan fungsi pertahanan yang berbasis kemanusiaan. Peran partisipatif ini sekaligus menjadi refleksi dari semangat TNI yang semakin inklusif, relevan, dan adaptif terhadap kebutuhan sosial masyarakat modern.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menegaskan bahwa keterlibatan prajurit Akademi Militer (Akmil) dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Magelang merupakan bentuk konkret dari pengabdian militer terhadap masyarakat dan perwujudan operasi militer selain perang (OMSP) yang humanis dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Peran prajurit dalam program ini tidak sekadar pelaksanaan tugas formal, tetapi juga manifestasi nilai-nilai pertahanan sosial yang menekankan gotong royong, kepedulian, dan kemanusiaan. Melalui kegiatan MBG, Akmil tidak hanya berkontribusi dalam pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga berperan strategis dalam membangun kepercayaan dan kedekatan antara TNI AD dan masyarakat sipil.

Berdasarkan hasil penelitian, ketiga dimensi peran menurut Soerjono Soekanto — peran aktif, pasif, dan partisipatif — menunjukkan sinergi yang kuat dan saling

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

---

melengkapi. Dalam peran aktif, prajurit berperan langsung dalam distribusi dan pengawasan logistik yang meningkatkan efisiensi program. Dalam peran pasif, mereka menunjukkan kedisiplinan, kepatuhan terhadap instruksi, dan netralitas yang menjaga stabilitas serta keharmonisan pelaksanaan kebijakan. Sementara dalam peran partisipatif, prajurit berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam kegiatan penyuluhan dan edukasi gizi, yang memperkuat kesadaran publik terhadap pentingnya pola makan sehat. Secara keseluruhan, keterlibatan prajurit Akmil dalam program MBG memperlihatkan pola integrasi antara nilai militer dan nilai sosial yang saling memperkuat.

Secara konseptual, hasil penelitian ini memperkaya pemahaman tentang bagaimana lembaga pertahanan dapat menjalankan fungsi sosialnya tanpa mengaburkan batas antara domain militer dan sipil. Pelibatan prajurit dalam program sosial seperti MBG membuktikan bahwa kekuatan pertahanan tidak hanya diukur dari aspek militeristik, tetapi juga dari kemampuan untuk menjadi bagian dari solusi atas persoalan kemanusiaan. Secara praktis, keterlibatan Akmil dalam kebijakan ini memperkuat legitimasi sosial TNI sebagai institusi yang profesional, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, efektivitas dan keberhasilan program MBG di Magelang dapat dilihat sebagai bukti keberhasilan *soft power* TNI dalam mendukung pembangunan nasional berbasis kesejahteraan rakyat.

## **SARAN**

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk memperkuat peran prajurit Akmil dalam program serupa di masa mendatang. Pertama, perlu dilakukan penguatan kapasitas pelatihan sosial bagi taruna agar mereka memiliki kemampuan komunikasi publik, penyuluhan gizi, dan manajemen kegiatan sosial yang lebih profesional. Kedua, sinergi antara Akmil, Dinas Ketahanan Pangan, dan pemerintah daerah perlu ditingkatkan melalui mekanisme koordinasi terpadu dan forum evaluasi berkala yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Ketiga, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan dukungan logistik dan anggaran agar

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

---

keberlanjutan program MBG dapat terjamin dan tidak bergantung pada kegiatan seremonial semata.

Keempat, keterlibatan prajurit hendaknya diarahkan tidak hanya pada pelaksanaan distribusi makanan, tetapi juga pada program pendampingan gizi dan ketahanan pangan keluarga di lingkungan masyarakat sekitar Magelang. Kegiatan semacam ini dapat memperluas dampak program MBG dari sekadar intervensi jangka pendek menjadi pemberdayaan sosial jangka panjang. Kelima, Akmil bersama Kementerian Pertahanan dapat menjadikan keberhasilan program MBG ini sebagai model nasional bagi pelibatan lembaga pertahanan dalam kegiatan kemanusiaan, khususnya di bidang kesehatan dan pangan.

Apabila langkah-langkah tersebut dijalankan secara konsisten, maka sinergi antara TNI AD dan masyarakat dalam konteks pembangunan manusia dapat terus diperkuat. RSAD, Akmil, dan unit pertahanan lainnya akan semakin diakui bukan hanya sebagai benteng pertahanan negara, tetapi juga sebagai kekuatan moral dan sosial yang turut membangun kesejahteraan rakyat Indonesia.

## **REFERENSI**

- Anderson, D., & Casey, M. (2020). *Civil-military cooperation in humanitarian operations: Lessons from Southeast Asia*. Singapore: ISEAS Publishing. <https://doi.org/10.1355/9789814881358>
- Badan Ketahanan Pangan Nasional. (2023). *Laporan Nasional Program Makan Bergizi Gratis Tahun 2023*. Jakarta: Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Basri, M., & Rahardjo, D. (2022). Sinergi TNI dan pemerintah daerah dalam peningkatan ketahanan pangan masyarakat. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 28(3), 201–220. <https://doi.org/10.22146/jkn.v28i3.2022>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

*Received : 22 Sept 2025*

*Accepted : 12 Okt 2025*

*Published : 23 Okt 2025*

- 
- Dinas Ketahanan Pangan Kota Magelang. (2024). *Laporan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Wilayah Kota Magelang Tahun 2024*. Magelang: Pemerintah Kota Magelang.
- Dwiyanto, A. (2020). *Manajemen pelayanan publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fitriani, E., & Rachman, F. (2021). The soft power dimension of Indonesian defense diplomacy. *Jurnal Ilmu Pertahanan*, 9(1), 33–49. <https://doi.org/10.33172/jip.v9i1.2021>
- Hasibuan, M. S. P. (2019). *Organisasi dan motivasi: Dasar peningkatan produktivitas*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hidayat, A., & Satria, D. (2023). Peran operasi militer selain perang (OMSP) dalam pembangunan sosial masyarakat Indonesia. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 13(2), 147–165. <https://doi.org/10.33172/jpbn.v13i2.2023>
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2024). *Kebijakan TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) Tahun 2024*. Jakarta: Kemenhan RI.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Nye, J. S. (2004). *Soft power: The means to success in world politics*. New York: Public Affairs.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2020). *Implementasi kebijakan publik: Konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Raharjo, D., & Wulandari, L. (2022). Kolaborasi militer dan masyarakat dalam ketahanan pangan nasional: Studi kasus pelibatan TNI AD dalam distribusi pangan. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 10(2), 111–130. <https://doi.org/10.23960/jakp.v10i2.2022>
- Saputra, R., & Widodo, H. (2023). Civil-military cooperation and humanitarian engagement in Indonesia's defense policy. *Journal of Defense Policy and Strategy*, 15(1), 65–84. <https://doi.org/10.31227/jdps.v15i1.2023>
- Soekanto, S. (2019). *Sosiologi: Suatu pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suharto, E., & Nugroho, S. (2024). Inovasi kolaboratif dalam program sosial berbasis kemanusiaan: Peran prajurit dan masyarakat sipil. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 8(1), 71–88. <https://doi.org/10.31227/jps.v8i1.2024>

*Received : 22 Sept 2025*

*Accepted : 12 Okt 2025*

*Published : 23 Okt 2025*

- 
- Suryana, N., & Prakoso, F. (2022). The role of defense human resources in non-military operations: Indonesian case analysis. *Asian Journal of Security and Peace Studies*, 10(2), 90–106. <https://doi.org/10.1177/ajps.v10i2.2022>
- Taufik, A., & Riyadi, D. (2023). Building community trust through military civic action programs. *Jurnal Komunikasi Kebijakan*, 7(3), 155–172. <https://doi.org/10.31227/jkk.v7i3.2023>
- Wibisono, H., & Kurniawan, A. (2021). Strengthening civil-military cooperation in social welfare programs: Evidence from Indonesia. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 9(2), 145–163.